

## **Collaborative Social Group Work in Organizing Equality Education (Study on the Earth Lantera Program by Tasikmalaya Mobilizing Youth in Galumpit Village, Setiawargi, Tasikmalaya City).**

### **Kelompok Kerja Sosial Kolaboratif Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan (Studi pada Program Lantera Bumi oleh Pemuda Penggerak Tasikmalaya di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya)**

**Shinta Analiana<sup>1\*</sup>, Lesi Oktiawanti<sup>1</sup> Ahmad Hamdan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Pendidikan Masyarakat, Universitas Siliwangi

\*Corresponding Author: [shintaanalo5@gmail.com](mailto:shintaanalo5@gmail.com)

**Abstract:** The problem of limited education for the people of Galumpit Village encouraged the emergence of the initiative of the Tasikmalaya Youth Mobilizer community (Pager Asik) to organize equality education collaboratively so that it is interesting to research. The purpose of this study is to find out the collaborative social work group in organizing equality education through the Lantera Bumi program by the Tasikmalaya Mobilizing Youth in Galumpit Village, Setiawargi, Tasikmalaya City. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results of the research on collaborative social work groups in organizing equality education through the Lantera Bumi program by the Tasikmalaya Youth Movement in Galumpit Village, Setiawargi, Tasikmalaya City, namely a) Engagement, intract, contract, Pager Asik initial approach, equalization of vision to make cooperation contracts with PKBM Al-Fattah, Setiawargi Village, and Karang Taruna; b) Assessment, identification of the needs of the people of Galumpit Village through transect walks and MPA-based citizen discussions; c) Planning, including socialization of package schools, data collection of learning residents, determination of schedules & places of study, recruitment of volunteer tutors and division of roles between parties involved; d) Interventions, learning activities and computer training; e) Monitoring and Evaluation, regular monitoring and monitoring once a year; f) Termination, has not been carried out by Pager Asik because it is felt that the community is not yet independent. The conclusion is that collaborative social working groups led by youth communities who collaborate with various parties are able to create a participatory, collaborative, and local needs-oriented equality education system.

**Keywords:** Social Group Work; Collaborative; Youth Mobilizer; Equality Education

**Abstrak:** Masalah keterbatasan menempuh pendidikan bagi masyarakat Kampung Galumpit mendorong munculnya inisiatif komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya (Pager Asik) untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan secara kolaboratif sehingga menarik untuk diteliti. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kelompok kerja sosial kolaboratif dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui program Lantera Bumi oleh Pemuda Penggerak Tasikmalaya di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian mengenai kelompok kerja sosial kolaboratif dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui program Lantera Bumi oleh Pemuda Penggerak Tasikmalaya di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya yaitu a) Engagement, intract, contract, Pager Asik pendekatan awal, penyamaan visi hingga melakukan kontrak kerja sama dengan PKBM Al-Fattah, Kelurahan Setiawargi, dan Karang Taruna; b) Assesment, identifikasi kebutuhan masyarakat Kampung Galumpit melalui transect walk dan rembug warga berbasis MPA; c) Planning, meliputi sosialisasi sekolah paket, pendataan warga belajar, penentuan jadwal & tempat belajar, rekrut tutor relawan dan pembagian peran antar pihak terlibat; d) Intervensi, kegiatan pembelajaran dan pelatihan komputer; e) Monitoring dan Evaluasi, pemantauan secara rutin dan monev setiap satu tahun sekali; f) Terminasi, belum dilakukan oleh Pager Asik karena dirasa masyarakat belum mandiri. Simpulannya yaitu kelompok kerja sosial kolaboratif yang dipimpin oleh komunitas pemuda yang berkolaborasi dengan berbagai pihak mampu menciptakan sistem pendidikan kesetaraan yang partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan lokal.

**Kata kunci:** Kelompok Kerja Sosial; Kolaboratif; Pemuda Penggerak; Pendidikan Kesetaraan



**History Article:** Submitted 20 October 2025 | Revised 9 December 2025 | Accepted 15 December 2025

**How to Cite:** (Analiana et al., 2025). Analiana, S., Oktiawanti, L., & Hamdan, A. (2025). Kelompok Kerja Sosial Kolaboratif Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan (Studi pada Program Lantera Bumi oleh Pemuda Penggerak Tasikmalaya di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya). *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 13(2), 174–191. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37064/jpm.v13i2.27185>

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan, kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Di Indonesia, masyarakat sudah mendapatkan jaminan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib memenuhinya yang tercantum dalam (UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Dengan demikian, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak dengan akses pendidikan yang memadai dan strategis. Pendidikan formal merupakan prioritas utama pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan secara nasional. Indonesia memang sudah mengalami banyak kemajuan pada bidang pendidikan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan tidak semua warga negara memiliki akses pendidikan yang mudah dijangkau. Hal ini bermakna bahwa pendidikan formal masih belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan. Penyebab dari hal demikian, terjadi karena berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi, faktor geografis, dan sosial budaya. Dampak dari adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut, banyak masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, 2024) menyatakan bahwa rata-rata lama sekolah di Jawa Barat itu 8,87 tahun. Hal ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat se-Jawa Barat hanya sampai jenjang SMP saja.

Menurut Yusuf & Razi (2025) menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi berpengaruh nyata dalam pencapaian pendidikan formal di Indonesia. Pemerintah perlu lebih memperhatikan daerah-daerah yang wilayahnya dengan pengeluaran rendah, tingkat kemiskinan tinggi, harapan hidup rendah, dan tingkat pendidikan juga rendah. Beberapa program yang direkomendasikan yaitu memberikan beasiswa daerah, menyediakan sekolah yang gratis dan terjangkau oleh masyarakat, dan memberikan bantuan dana. Dalam konteks ini, pendidikan kesetaraan menjadi jalur alternatif yang memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan untuk mengikuti pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal berupa paket A, B, dan C yang setara dengan pendidikan formal yaitu SD, SMP dan SMA (UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003). Pendidikan ini bersifat fleksibel dan memungkinkan masyarakat memperoleh ijazah yang resmi sehingga memberikan peluang lebih besar dalam dunia kerja, pendidikan lanjutan maupun pengembangan diri.

Pendidikan bisa dijadikan sebagai alat pemberdayaan terutama pendidikan orang dewasa termasuk pendidikan kesetaraan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Freire et al., 2018) bahwa pendidikan harus menjadi proses yang membebaskan dan memberdayakan, memungkinkan orang untuk menjadi subjek dalam proses belajar dan perubahan sosial. Pendidikan juga akan menjadi alat pemberdayaan sebagai solusi untuk daerah yang mengalami keterbelakangan pendidikan. Generasi muda memiliki peran strategis menjadi penggerak dalam program pemberdayaan sebagai agen perubahan sosial. Tercantum dalam Undang-Undang (UU) No. 40 Tahun 2009 Kepemudaan (2009) menyatakan bahwa pemuda merupakan warga negara Indonesia berusia 16-40 tahun yang memasuki masa pertumbuhan dan perkembangan. Wujud pemuda sebagai agen pembaharu yaitu dengan mengembangkan pendidikan politik dan demonstrasi, sumber daya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda. Maka dari itu, pemuda merupakan kunci penting sebagai sumber daya penggerak dalam membangun bangsa dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemuda berfungsi sebagai sumber daya yang memiliki potensi besar sebagai generasi penerus yang berperan penting dalam membawa perubahan di dalam masyarakat. Pemuda memainkan peran yang signifikan sebagai control social, kekuatan moral, dan sebagai agent of

change (Susanto, 2016) dalam (Adi Saputra, 2019). Menurut Banurea (2017) dalam Napsiyah et al. (2023) menyatakan bahwa pemuda yang ikut terlibat dalam kegiatan sosial di masyarakat merupakan pemuda yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini bermakna bahwa pemuda sangat berperan penting dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat. Pada konteks pendidikan kesetaraan sebagai solusi dari adanya kesenjangan atau keterbelakangan di suatu daerah, pemuda berperan menjadi penggerak utama yang dapat memobilisasi komunitas dan menginisiasi program-program pendidikan alternatif yang berkelanjutan seperti pendidikan kesetaraan. Program Lantera Bumi di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya menunjukkan secara nyata bagaimana generasi muda memainkan peran kunci dalam menghadirkan pendidikan kesetaraan sebagai solusi dari permasalahan masyarakat. Melalui upaya ini, pemuda berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan jembatan antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi sosial lainnya. Kampung Galumpit yang berada di Kelurahan Setiawargi Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai permasalahan sosial khususnya keterbatasan akses pada pendidikan formal. Rata-rata masyarakat Kampung Galumpit menempuh pendidikan itu hanya sampai SD dan SMP saja. Hal tersebut sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia (2024) yang menunjukkan Rata-Rata Lama Sekolah (RTL) di Kota Tasikmalaya hanya mencapai 7,97. Kondisi demikian, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keterbatasan ekonomi sehingga masyarakat memilih untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup daripada menempuh pendidikan, akses ke sekolah formal itu cukup jauh sehingga memicu hilangnya keinginan untuk menempuh pendidikan, minimnya program pendidikan alternatif bagi masyarakat yang mencakup semua jenjang usia dengan waktu yang fleksibel, lokasi dekat rumah dan mudah diakses, dan belum meratanya pemahaman masyarakat mengenai pendidikan nonformal bahkan kesadaran akan pentingnya pendidikan itu masih rendah.

Program Lantera Bumi hadir sebagai respon terhadap kondisi demikian dengan menyelenggarakan pendidikan alternatif berupa pendidikan kesetaraan yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Program ini membangun rasa kepemilikan dan partisipasi aktif masyarakat. Program Lantera Bumi merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya. Komunitas ini sebagai organisasi kepemudaan di bidang sosial. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Kota Tasikmalaya melalui peran para pemuda Tasikmalaya. Pelaksanaan program Lantera Bumi yang dijalankan oleh Komunitas Pager Asik berlokasi di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya sebagai program pemberdayaan masyarakat dalam bidang pendidikan yaitu menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dengan membentuk kelompok kerja sosial kolaboratif. Salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah sosial yaitu melalui kelompok kerja sosial yang saling bekerja sama dan saling berpartisipasi aktif dalam proses pemberdayaan (Oktiawanti, 2016). Kelompok kerja sosial atau social group work pada dasarnya merupakan pendekatan yang biasa digunakan oleh pekerja sosial dengan memanfaatkan kelompok sebagai instrumen pertolongan Zastrow (1995) dalam (Wibowo, 2017). Istilah instrumen tersebut tidak hanya mengindikasikan kelompok sebagai media teknis saja, tetapi juga menunjukkan bahwa kelompok bersifat dinamis, memiliki interaksi yang nyata dan menjadi wahana perubahan yang digerakkan oleh anggota yang berada dalam kelompok tersebut. Dalam hal ini, kelompok tidak hanya berfungsi sebagai sebuah pendekatan yang digunakan pekerja sosial, tetapi juga berfungsi sebagai aktor sosial itu sendiri untuk menjalankan proses pertolongan melalui interaksi dan dinamika internalnya sehingga posisinya dapat dipandang sebagai subjek aktif. Di sisi lain pendapat (Robert Klenk dan Robert Ryan) dalam Syamsuddin (2020) memperkuat hal tersebut dengan mengemukakan bahwa kelompok kerja sosial atau social group work merupakan metode yang biasanya digunakan oleh pekerja sosial dalam memperbaiki dan meningkatkan kemampuan seseorang melalui pengalaman berkelompok yang telah direncanakan secara sadar dan memiliki tujuan yang jelas. Pengalaman berkelompok ini tidak dapat terwujud tanpa adanya partisipasi aktif dari anggota, kerja sama maupun pengambilan keputusan bersama sehingga kelompok bukan hanya sekedar alat, melainkan entitas sosial yang hidup menjalankan fungsi sosialnya secara sadar dan terarah.

Sedangkan menurut Gitterman & Shulman (2005) dalam Prasetyo Adi Franciscus & Wulandari Kusuma (2023) kelompok kerja sosial social group work adalah suatu pendekatan pekerjaan sosial yang menggunakan kelompok untuk memperkuat anggota tim tentang kegiatan

sosial, konektivitas sosial, dukungan sosial, keterampilan untuk mengatasi masalah, penerimaan diri, penyediaan psikologis, ataupun mendorong tindakan individu. Konsep penguatan kelompok dalam hal ini bermakna bahwa kelompok dapat berfungsi sebagai pendukung yang mampu menciptakan perubahan sosial yang efektif, dimana kelompok tidak diperlakukan sebagai alat tetapi sebagai pihak yang berperan dalam menghasilkan proses pertolongan tersebut. Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa selain dipahami sebagai metode, kelompok kerja sosial (*social group work*) juga berfungsi sebagai subjek yang menjalankan peran sosial tertentu yang memiliki struktur internal, nilai, sumber daya, tujuan dan kemampuan kolektif yang memungkinkan untuk menjalankan proses pertolongan sosial tersebut. Pemahaman kelompok kerja sosial sebagai metode dan sebagai subjek merupakan dua perspektif yang saling melengkapi. Metode memberikan prinsip, proses, dan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana kelompok kerja sosial seharusnya beroperasi, sedangkan perspektif kelompok kerja sosial sebagai subjek menjelaskan bagaimana kelompok berperan secara nyata dalam praktik sosial. Dalam konteks penelitian ini, kedua perspektif tersebut digunakan secara bersamaan saling melengkapi, dimana kelompok kerja sosial sebagai metode sebagai dasar atau kerangka dalam memahami dinamika dan proses kelompok, sedangkan kelompok kerja sosial sebagai subjek digunakan untuk melihat bagaimana kelompok berfungsi sebagai pelaku atau pihak utama yang berperan dalam menjalankan proses pertolongan sosial tersebut. Dengan demikian, kelompok dalam penelitian ini tidak hanya diposisikan sebagai alat metodologis saja, tetapi juga sebagai entitas yang menjalankan proses-proses sosial sesuai dengan konsep atau prinsip kelompok kerja sosial. Menurut Zastrow (2004) dalam menyelesaikan masalah sosial yang dihadapi klien, terdapat beberapa tahapan yang diterapkan dalam kelompok kerja sosial (*social group work*) yaitu sebagai berikut (Muayyadah & Bengkel, 2023) yaitu tahap *engagement*, *intract*, *contract*, tahap *assesment*, tahap *planning*, tahap intervensi, tahap *monitoring*, tahap evaluasi dan tahap terminasi.

Integrasi peran kolaboratif kelompok kerja sosial dengan komunitas pemuda sebagai penggerak utama khususnya dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan ternyata belum ada yang meneliti secara mendalam. Biasanya, pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai serta pengawasan dari Dinas Pendidikan setempat (Harlinda et al., 2020). Namun, penelitian ini mengeksplorasi pendekatan inovatif dimana pendidikan kesetaraan dijalankan secara kolaboratif di tempat tinggal warga di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya yang diinisiasi oleh komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya (Pager Asik) bukan PKBM. Pendekatan ini memanfaatkan ruang komunitas nonformal untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat yang sulit menjangkau PKBM, sehingga mengisi kekosongan pengetahuan tentang adaptasi program yang fleksibel dan berorientasi pada kebutuhan lokal. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada implementasi model kelompok kerja sosial yang dijalankan secara kolaboratif oleh Komunitas Pager Asik bersama PKBM Al-Fattah, Kelurahan Setiawargi dan Karang Taruna dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Penelitian ini menempatkan komunitas pemuda sebagai aktor utama yang menjalankan fungsi pekerja sosial dalam konteks pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman mengenai kelompok kerja sosial secara kolaboratif dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dengan kontribusi pemuda sebagai penggerak utama. Urgensi dalam penelitian ini terletak pada kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan yang cukup mendesak untuk mengatasi sulitnya menjangkau pendidikan formal yang dampak jangka panjangnya akan meningkatkan ketimpangan sosial dan ekonomi. Maka dari itu perlu menghadirkan model penyelenggaraan pendidikan yang lebih inovatif, adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu mengembangkan pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang berlokasi di sekitar tempat tinggal masyarakat yang membutuhkan pendidikan dengan melibatkan para pemuda sebagai penggerak bidang pendidikan.

Hadirnya Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya (Pager Asik) sebagai inisiator pendidikan kesetaraan melalui program Lantera Bumi menunjukkan adanya inovasi sosial yang menandai pergesean peran pemuda, dari sekedar penerima manfaat menjadi agen perubahan. Penelitian ini juga memiliki relevansi dalam konteks pengembangan pendidikan dan

pemberdayaan masyarakat di Indonesia. Dengan memahami kontribusi kelompok kerja sosial yang berkolaborasi, terutama dipimpin oleh generasi muda, diharapkan model pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan dapat dikembangkan untuk meningkatkan akses pendidikan kesetaraan di kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Kelompok Kerja Sosial Kolaboratif Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan" Studi pada Program Lantera Bumi oleh Pemuda Penggerak Tasikmalaya di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya". Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, organisasi sosial, dan para pemangku kepentingan dalam merancang program pemberdayaan masyarakat yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana kelompok kerja sosial kolaboratif menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui program lantera bumi oleh Pemuda Penggerak Tasikmalaya di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya. Dengan memahami kontribusi kelompok kerja sosial yang berkolaborasi, terutama dipimpin oleh generasi muda, diharapkan model pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan dapat dikembangkan untuk meningkatkan akses pendidikan kesetaraan di kelompok masyarakat yang terpinggirkan.

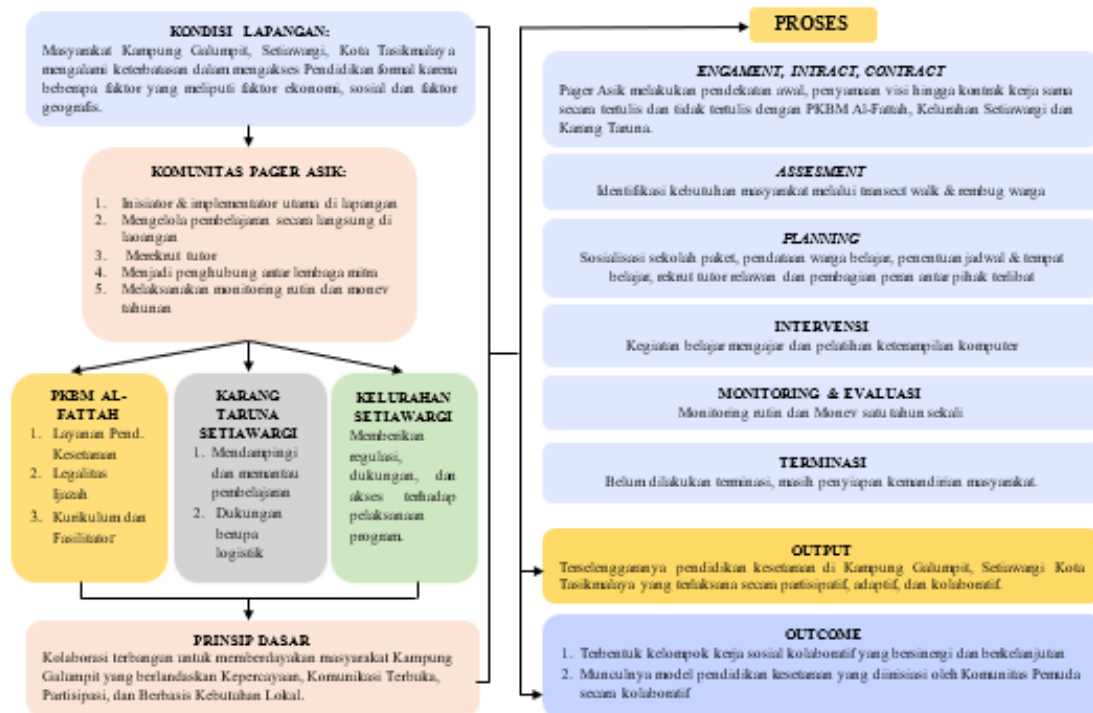
## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menggali secara mendalam bagaimana kelompok kerja sosial kolaboratif menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui program lantera bumi dengan pemuda sebagai penggerak utama di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya yang berkolaborasi dengan Kelurahan Setiawargi, Karang Taruna Setiawargi, dan PKBM Al-Fattah. Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan *heterogenous purposive sampling* yang didasarkan pada pertimbangan atau kriteria spesifik tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian (Martha dan Kresno, 2016) dalam (Haryoko et al., 2020). Subjek dalam penelitian ini terdapat empat kategori yaitu R1 dari pihak komunitas Pager Asik sebagai penanggungjawab dan penggerak program, R2 dari PKBM AL-Fattah sebagai lembaga yang menaungi secara resmi pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit, R3 yaitu warga belajar pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit sebagai penerima manfaat, dan R4 yaitu Kelurahan Setiawargi dan Karang Taruna Setiawargi sebagai stakeholders lokal yang memberikan dukungan dan legitimasi program. Dari empat kategori tersebut dipilih delapan informan yaitu Penanggungjawab Program Lantera Bumi dari Komunitas Pager Asik, Ketua Program Lantera Bumi, Penanggungjawab Pendidikan Kesetaraan dari Komunitas Pager Asik, Penanggungjawab Pendidikan Kesetaraan/Waka Kesiswaan dari PKBM Al-Fattah, Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan Kampung Galumpit sebanyak dua orang, Kepala Kelurahan Setiawargi, dan Ketua Karang Taruna. Delapan informan ini dipilih berdasarkan kriteria seperti memiliki keterlibatan langsung pada program dari tahap perencanaan hingga evaluasi dan memiliki peran strategis dalam program tersebut sehingga dapat mengungkap kolaborasi kelompok kerja sosial tersebut dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit, Setiawargi Kota Tasikmalaya.

Adapun objek dari penelitian ini yaitu pelaksanaan pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan secara kolaboratif oleh kelompok kerja sosial melalui program lantera bumi oleh komunitas Pemuda Penggerak Kota Tasikmalaya (Pager Asik) sebagai penggerak utama. Teknik pengumpulan datanya melalui observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data di lapangan selesai, maka dilakukan analisis data menggunakan teknik model Miles & Huberman (2014) dalam Saleh (2023) yang terdiri dari kondensasi data (merangkum, memilih dan memilah temuan utama, mengelompokkan hal-hal penting, serta dilakukan pencarian tema dan pola dari data lapangan yang melimpah dan kompleks tersebut), penyajian data (berupa teks naratif, bagan maupun grafik), dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari Pager Asik, PKBM, warga belajar dan kelurahan setiawargi serta karang taruna. Kemudian juga dilakukan triangulasi teknik melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian dilakukan di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya.

## Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan memaparkan data yang dikumpulkan di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis dengan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu yang memungkinkan verifikasi dan penarikan kesimpulan data lebih mudah. Bagian ini juga akan menjawab rumusan masalah mengenai kelompok kerja sosial kolaboratif dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit melalui program Lantera Bumi oleh Pemuda Penggerak Tasikmalaya di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya. Kelompok kerja sosial kolaboratif dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit melalui beberapa tahap yang dimulai dari tahap *engagement*, *intract*, dan *contract*, tahap *assesment*, *planning*, intervensi, *monitoring*, evaluasi dan terminasi. Tahap-tahap tersebut dijelaskan pada sub bab di bawah ini:



Gambar 1. Hasil Penelitian

### A. Tahap *Engagement, Intract, Contract (EIC)*

Pada tahap awal ini, Komunitas Pager Asik melakukan pendekatan personal secara humanis dan dialogis untuk membangun kepercayaan dari berbagai pihak yaitu Kelurahan Setiawargi, Karang Taruna, dan PKBM Al-Fattah dalam rangka membentuk kelompok kerja sosial kolaboratif. Setelah itu terjadi komunikasi dan diskusi serta penyamaan visi misi untuk mencapai tujuan bersama yaitu menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit. Kemudian dilakukan kesepakatan kerja sama dengan pihak-pihak dan adanya MoU kerja sama antara Kelurahan Setiawargi dengan PKBM Al-Fattah. Menurut NM, langkah awal yang ditempuh oleh Pager Asik dan volunteer Lantera Bumi ketika akan menjalankan program Lantera Bumi yaitu bersilaturahmi ke kelurahan setiawargi dan kepada Karang Taruna Setiawargi untuk meminta izin pelaksanaan program sebagai langkah awal dalam menjalin kerja sama. Silaturahmi juga dilakukan kepada PKBM Al-Fattah sebagai calon mitra kerja sama dalam menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan. Setelah silaturahmi tersebut, dilakukan komunikasi lanjutan dan berdiskusi mengenai permasalahan serta kebutuhan masyarakat di Kampung Galumpit. Kemudian ada penyamaan visi misi hingga dilakukan kontrak kerja sama berupa MoU resmi antara Kelurahan Setiawargi dan PKBM Al-Fattah. Hal serupa diungkapkan oleh SN dan AR bahwa Komunitas Pager Asik pertama kali melakukan pendekatan dan bersilaturahmi kepada kKelurahan Setiawargi, Karang Taruna, dan PKBM AL-Fattah dengan tujuan menjalin kerja sama dalam

program Lantera Bumi khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Berdasarkan hasil observasi, peneliti juga terlibat langsung dalam pertemuan awal dengan PKBM Al-Fattah dan mencatat bahwa proses komunikasi dan diskusi tersebut dilaksanakan secara terbuka dan informatif sehingga terjalin kerja sama antara Pager Asik, PKBM Al-Fattah dan Kelurahan Setiawargi. Meskipun dokumentasi berupa foto awal pertemuan tidak ada, tetapi terdapat dokumen MoU yang menunjukkan adanya kerja sama secara resmi antara PKBM Al-Fattah dan Kelurahan Setiawargi melalui Pager Asik. Salinan MoU tersebut dipegang oleh kedua belah pihak yaitu pihak PKBM Al-Fattah dan Kelurahan Setiawargi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tahap awal ini bukan hanya sekadar langkah administratif dalam pembentukan kemitraan saja melainkan praktik nyata kelompok kerja sosial kolaboratif yang menekankan relasi, kolaborasi, dan tanggungjawab kolektif dalam menyelesaikan masalah sosial dengan membangun kepercayaan, memperjelas peran, dan menumbuhkan komitmen kolektif. Pendekatan awal melalui silaturahmi dan dialog terbuka memungkinkan pager asik untuk menciptakan *trust building* antara Pager Asik dengan PKBM Al-Fattah, Kelurahan Setiawargi, dan Karang Taruna Setiawargi. Hal ini sejalan dengan konsep kelompok kerja sosial (*social group work*) yang dikemukakan oleh Zastrow (2004) dalam Muayyadah & Bengkel (2023) bahwa tahap awal dalam penyelesaian masalah sosial oleh kelompok kerja sosial melalui pembentukan hubungan dan kepercayaan sebagai bagian dari menjalin kolaborasi dan tanggungjawab bersama secara profesional. Sikap keterbukaan, kesetaraan, dan komunikasi dua arah yang dibangun oleh Pager Asik menjadi kunci utama terbentuknya hubungan kolaboratif menuju penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Grey (1989) dalam Fairuz (2019) bahwa kolaborasi melibatkan beberapa komponen yaitu saling ketergantungan, penyatuan pemikiran secara konstruktif untuk mencapai tujuan bersama, pengambilan keputusan disepakati bersama, dan tanggungjawab bersama. Dalam mencapai tujuan bersama, kelompok kerja sosial kolaboratif antara Pager Asik, PKBM Al-Fattah, Kelurahan Setiawargi, dan Karang Taruna melakukan penyamaan visi dan tujuan bersama, saling melengkapi dan mendukung dalam menjalankan peran masing-masing. Dalam konteks ini, peran Pager Asik sebagai pemrakarsa dan pelaksana lapangan yang mengetahui kebutuhan realitas warga Kampung Galumpit, PKBM berperan menyediakan legalitas dan kurikulum, sedangkan Kelurahan Setiawargi dan Karang Taruna berperan dalam memberikan legitimasi sosial dan dukungan ruang kebijakan.

Keterlibatan Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya (Pager Asik) sebagai aktor utama dalam tahap ini mencerminkan praktik nyata di lapangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Widyanto (2010) dalam Prasetyo (2020) bahwa pemuda memiliki kepekaan terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan memiliki potensi sebagai agen perubahan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dengan memiliki sifat yang progresif, idealis dan penuh semangat. Peran ini terwujud dalam keberanian Pager Asik untuk menginisiasi kolaborasi lintas lembaga, mengartikulasikan kebutuhan masyarakat, dan menggerakkan kolaborasi lintas sektor yang sebelumnya belum terbentuk. Dalam proses ini, komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya (Pager Asik) tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis saja, tetapi juga menjalankan fungsi penghubung antar lembaga dengan memperjelas informasi, menjembatani kebutuhan masyarakat, dan memastikan seluruh pihak dapat memahami peran dan kontribusi masing-masing. Peran tersebut mencerminkan fungsi broker (Syamsuddin, 2020) karena tidak hanya mempertemukan pihak-pihak yang terlibat tetapi juga memudahkan masyarakat terhadap sumber daya pendidikan. Dalam konteks penelitian ini, Pager Asik berperan sebagai *broker* dengan menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan menghubungkan kebutuhan warga Kampung Galumpit dengan sumber daya edukatif milik PKBM Al-Fattah dan dukungan struktural dari Kelurahan Setiawargi. Peran broker inilah yang memperkuat efektivitas tahap EIC karena mampu mengatasi hambatan informasi, jarak, dan minimnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan formal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi et al. (2025) bahwa penerapan pendekatan partisipatif dan kolaborasi dengan berbagai lintas sektor sesuai kepentingan program merupakan dasar utama yang penting untuk mencapai keberhasilan pekerja sosial dalam menyelesaikan masalah sosial. Berbeda dengan konteks penelitian di atas yang menyoroti pekerja sosial masyarakat secara profesional, peneliti ini justru berfokus pada

Komunitas Pemuda (non-profesional) yang mengadaptasi konsep kelompok kerja sosial kolaboratif dalam melakukan pemberdayaan bidang pendidikan. Hal ini memperluas pemahaman bahwa kelompok kerja sosial kolaboratif tidak hanya berlaku bagi pekerja sosial formal saja tetapi juga dapat diterapkan oleh komunitas yang berperan aktif dalam bidang sosial yang memiliki kapasitas sosial. Dengan demikian, tahap ini pada kelompok kerja sosial kolaboratif dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui program Lantera Bumi di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya tidak hanya sekadar langkah awal sebagai formalitas saja tetapi bagian dari sebuah proses sosial sebagai upaya menumbuhkan kepercayaan, membangun relasi yang tulus dan menerapkan keterlibatan aktif dalam berbagai pihak melalui pendekatan humanis dan dialogis. Selain itu, tahap ini juga menjadi pondasi awal yang kuat dalam terbentuknya solidaritas, kejelasan peran, dan komitmen kolektif. Keterlibatan Pager asik yang berperan sebagai *broker*, fasilitator dan agen perubahan menjadikan kolaborasi ini mampu menjawab hambatan struktural pendidikan masyarakat Kampung Galumpit. Tahapan ini dapat menjadi model pengembangan kolaborasi atau kerja sama yang dilakukan oleh suatu komunitas, terutama yang melibatkan pemuda sebagai aktor utama bidang sosial.

## **B. Tahap *Assesment***

Pager Asik melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat Kampung Galumpit secara kolaboratif dan partisipatif melalui *transect walk* atau penelusuran wilayah yang didampingi oleh Karang Taruna, dan rembug warga berbasis *Methodology Participatory for Assesment* (MPA). Menurut NM, setelah mendapat data awal dari kelurahan, Pager Asik dan volunteer lantera bumi melakukan asesmen lanjutan yang disebut inisiasi sosial berupa transect walk atau penelusuran wilayah Kampung Galumpit dan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan panduan yang sudah disusun sebelumnya. Ditemukan bahwa masyarakat Kampung Galumpit memiliki kesulitan dalam menempuh pendidikan formal karena faktor ekonomi dan faktor geografis. Setelah itu diadakan rembug warga yang menggunakan MPA dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Hal serupa diungkapkan oleh AF dan SJ bahwa komunitas Pager Asik melakukan kegiatan penelusuran wilayah Kampung Galumpit untuk mengetahui kebutuhan masyarakat yang didampingi oleh Karang Taruna dan masyarakat dilibatkan secara langsung pada kegiatan rembug warga. Berdasarkan hasil observasi, peneliti terlibat langsung dalam kegiatan dengan melihat dan mengamati antusias dan partisipasi aktif masyarakat secara terbuka pada sosialisasi sekolah paket. Dokumentasi berupa foto juga menunjukkan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam sosialisasi tersebut, maka dari itu kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian penting dari tahap assesment.

Tahap *assesment* merupakan tahap penggalan kebutuhan masyarakat yang menentukan arah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan konteks sosial. Dalam penelitian ini, tahap assesment yang dilakukan tidak hanya mengumpulkan data-data kebutuhan masyarakat saja, melainkan menjadi tahap assesment yang membangun kesadaran masyarakat tentang kondisi pendidikan yang dialami dan dirasakan oleh masyarakat sendiri di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya. Kegiatan *transect walk* yang dilakukan oleh Pager Asik bersama Karang Taruna menjadi mekanisme penggalan kebutuhan berbasis konteks lokal. Dengan hadir secara langsung di pemukiman warga, proses ini memungkinkan identifikasi hambatan sistemik seperti akses geografis sulit, tekanan ekonomi keluarga, dan rendahnya ekspektasi pendidikan. Pengalaman langsung ini mengungkap permasalahan masyarakat secara mendalam dan memperkuat validitas data serta meningkatkan kepekaan Pager Asik terhadap kondisi sosial masyarakat. Hal ini mencerminkan praktik nyata dari teori yang membahas tahap assesment yang diungkapkan oleh Zastrow (2004) dalam Muayyadah & Bengkel (2023; hlm. 32) bahwa tahap assesment merupakan tahap penggalan permasalahan dan kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam dengan sudah mulai memahami latar belakang, hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitar, dan mengetahui penyebab utama permasalahan yang dialami.

Selanjutnya penerapan rembug warga berbasis MPA (*Methodology Participatory for Assesment*) bukan hanya sekedar memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan jawaban saja, tetapi juga menafsirkan pengalaman mereka sendiri atas masalah pendidikan. Menurut Sutton & Kemp (2006) dalam Istyawan (2025) mengemukakan bahwa MPA merupakan kerangka desain yang berfungsi memfasilitasi sebuah pertemuan partisipatif untuk menganalisis



permasalahan masyarakat secara mendalam dengan cara masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Dalam konteks penelitian ini, rembug warga berhasil menggali isu-isu sistemik seperti keterbatasan ekonomi, kondisi geografis yang menyulitkan, rendahnya informasi tentang pendidikan nonformal, serta pola budaya yang membuat pendidikan dianggap tidak prioritas. Yang membuat tahap ini efektif adalah kemampuannya menggeser warga dari posisi "penerima manfaat" menjadi subjek yang sadar akan struktur yang mengekang mereka. PKBM pun turut terlibat dalam tahap ini dengan melakukan validasi data yang sudah didapat melalui pengecekan IPM dan hasilnya wilayah Tamansari Kelurahan Setiawargi cukup rendah termasuk pendidikannya. Hal ini mencerminkan secara nyata salah satu kode etik pekerja sosial yang dikemukakan oleh *National Association of Social Worker* (NASW) tahun 2021 yang menekankan bahwa pekerjaan sosial harus berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk dilaksanakan secara bersama. Dalam konteks penelitian ini, Pager Asik dan PKBM Al-Fattah tidak saling mendominasi tetapi justru saling mendukung dan memperkuat satu sama lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Jodis Simanullang et al. (2023) menerapkan metode social group work dengan menggunakan tahapan dari Zastrow (2004) yang menunjukkan bahwa tahap assessment dilakukan melalui FGD terstruktur yang dipandu oleh pekerja sosial profesional. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini meskipun menggunakan tahap Zastrow (2004) tetapi pada tahap assessment mengadopsi FGD yang dimodifikasi menjadi rembug warga berbasis *Methodology Participatory for Assessment* (MPA) sebagai ruang dialog kolektif masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya berupa permasalahan atau potensi lokal melalui kesadaran dari masyarakat yang berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Adaptasi ini membuat *assessment* lebih inklusif dan tidak menimbulkan jarak antara fasilitator dengan masyarakat karena bentuk diskusinya lebih natural dan mudah diikuti. Hasilnya, *assessment* tidak hanya menghasilkan pemetaan masalah yang lebih kaya, tetapi juga menumbuhkan sense of ownership masyarakat terhadap program pendidikan kesetaraan. Dengan demikian, tahap *assessment* yang dilakukan kelompok kerja sosial kolaboratif dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui program lantera bumi di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya berhasil dilaksanakan secara partisipatif, dan kolaboratif melalui transect walk dan rembug warga berbasis MPA yang mengungkap permasalahan pendidikan di Kampung Galumpit meliputi faktor geografis, ekonomi, dan budaya. Proses dalam tahap *assessment* ini tidak hanya menghasilkan data saja tetapi juga membangun kesadaran dan komitmen masyarakat bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan merupakan milik bersama dan menjadi tanggungjawab bersama. Dari sudut pemberdayaan, *assessment* semacam ini terbukti tidak hanya menghasilkan data, tetapi membentuk kapasitas sosial masyarakat untuk terlibat penuh dalam seluruh tahapan program. Secara praktis, model *assessment* ini dapat direplikasi di wilayah 3T sebagai alat untuk mengidentifikasi kebutuhan secara akurat dan membangun kepemilikan pada masyarakat terhadap program.

### C. Tahap *Planning*

Tahap ini merupakan tahap perencanaan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan yang meliputi penyusunan *brief*, sosialisasi dengan dua tahap yaitu sosialisasi tahap I tentang pentingnya pendidikan secara umum dan gambaran mengenai sekolah paket sekaligus pembukaan pendaftaran calon warga belajar. Selanjutnya terdapat sosialisasi tahap II yang mendalam bagi warga belajar yang sudah terdaftar mengenai pendidikan kesetaraan dan berlanjut pada penentuan jadwal dan lokasi belajar yang dilaksanakan secara bottom-up dengan melibatkan partisipasi calon warga belajar dengan menyesuaikan kondisi sosial calon warga belajar, kemudian disepakati secara bersama. Selain itu terdapat perekrutan tutor relawan dan pembagian tugas antar pihak yang terlibat. Menurut NM dan AA bahwa tahap perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit dimulai dengan pembuatan *brief*, sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan dan penjelasan mengenai pendidikan kesetaraan. Setelah itu ada perekrutan warga belajar dan perekrutan tutor relawan dari Pager Asik serta penentuan jadwal, tempat, dan metode ajar yang melibatkan warga belajar secara langsung supaya sesuai dengan kegiatan sosial masyarakat. Menurut AR, selaku dari pihak PKBM Al-fattah mengemukakan bahwa perekrutan tutor relawan dari Pager Asik dikarenakan jarak dari PKBM ke

Kampung Galumpit tersebut cukup memakan waktu jika harus secara rutin mengajar di sana. Menurut SJ dan UW mengemukakan bahwa warga belajar dilibatkan secara langsung dalam penentuan tempat belajar, jadwal dan metode pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi peneliti, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit memiliki kesadaran yang tinggi terkait peran dan tanggungjawabnya serta komunikasi antar pihak pun tetap berjalan meskipun melalui grup whatsapp. Pola kolaboratifnya terbentuk secara alami dan menunjukkan sinergi yang kuat dalam praktik sosial di masyarakat meskipun tidak terdokumentasikan secara resmi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tahap *planning* tidak hanya menjadi tahapan teknis penyusunan kegiatan, tetapi merupakan proses negosiasi sosial yang membentuk struktur kolaborasi yang matang. Keterlibatan seluruh pihak yaitu Pager Asik, PKBM, Karang Taruna, dan Kelurahan Setiawargi serta warga belajar menggambarkan bahwa perencanaan telah berkembang menjadi ruang dialog yang memastikan program benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat Kampung Galumpit. Keberhasilan tahap ini tidak terlepas dari pondasi kepercayaan dan pemahaman bersama yang telah terbentuk pada tahap awal, sehingga perencanaan dapat dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan responsif. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Zastrow (2004) dalam Muayyadah & Bengkel (2023) pada tahap *planning* bahwa penyusunan rencana yang dilakukan untuk mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat harus sesuai kebutuhan masyarakat. Pada penentuan jadwal dan lokasi belajar, masyarakat dilibatkan secara aktif melalui pendekatan *bottom up* yang menempatkan warga sebagai subjek bukan objek. Keterlibatan warga secara langsung mencerminkan nilai demokratis dalam kelompok kerja sosial sesuai yang dikemukakan oleh (Albert, 1980) dalam Putri (2023) bahwa tujuan dari kelompok kerja sosial yaitu adanya tanggungjawab dan partisipasi anggota untuk menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai demokratis dan tanggungjawab bersama terhadap program yang akan dijalankan.

Rekrutmen tutor relawan dari komunitas Pager Asik menunjukkan kemampuan kelompok kerja sosial kolaboratif dalam merespon hambatan struktural. Jarak PKBM ke Kampung Galumpit menjadi kendala operasional yang dapat menghambat kontinuitas pembelajaran. Dengan melibatkan tutor dari komunitas lokal, kolaborasi ini menunjukkan fleksibilitas dan kecerdasan sosial untuk mengatasi keterbatasan tanpa mengurangi kualitas layanan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Schmidt (2003) dalam Anriani et al. (2021) mengemukakan bahwa *in collaborative, planning and implementing are joint effort* yang bermakna bahwa kolaborasi yang dibangun untuk menjalankan sebuah program supaya berjalan dengan efektif maka proses perencanaan dan pelaksanaan harus menjadi usaha Bersama dengan memanfaatkan kekuatan unik dari masing-masing pihak. Komunikasi yang terjalin antar pihak tidak selalu berbentuk forum formal yang menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi dalam perencanaan tidak harus selalu dalam struktur birokrasi formal. Keberhasilan tahap perencanaan ini justru ditopang oleh *trust based collaboration*, dimana transparansi, kepedulian, dan keinginan untuk saling mendukung menjadi modal sosial dalam proses perencanaan ini. Hal tersebut membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Harlinda et al. (2020) yang menekankan perencanaan pendidikan kesetaraan di PKBM bersifat birokratis dengan fungsi perencanaan sepenuhnya oleh PKBM dan Dinas Pendidikan sebagai pengawas.

Dalam penelitian ini, perencanaan pelaksanaan pendidikan kesetaraan berbasis jejaring kolaboratif dnegan penggerak utamanya yaitu Pager Asik yang berkolaborasi dengan PKBM Al-Fattah, Kelurahan Setiawargi, dan Karang Taruna. Hal ini menunjukkan bahwa Pager Asik sebagai komunitas pemuda bisa menjadi penggerak utama tanpa bergelar pekerja sosial profesional tetapi memiliki keterampilan kepemimpinan partisipatif dan kontekstual serta memiliki pemahaman mengenai program-program sosial. Dengan demikian, tahap perencanaan ini tidak hanya menghasilkan rencana kegiatan sesuai kebutuhan saja, tetapi juga membangun *collective agency* (kemampuan bertindak bersama kelompok untuk mencapai tujuan bersama). Proses ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan tidak bergantung pada kelengkapan dokumen formal, melainkan pada sejauh mana perencanaan tersebut mencerminkan kepentingan bersama dan dijalankan secara kolaboratif. Model perencanaan dalam penelitian ini dilakukan secara kolaboratif, partisipatif dan sistematis yang didasarkan pada kepercayaan, komunikasi terbuka dan kesadaran kolektif akan peran serta tanggungjawab masing-masing dari pihak-pihak yang

terlibat. Ini menunjukkan bahwa proses pada tahap perencanaan yang kuat tidak bergantung pada formalitas semata melainkan pada kepercayaan, sinergi dan komitmen bersama.

#### **D. Tahap Intervensi**

Pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit meliputi kegiatan belajar mengajar dengan dua kali pertemuan dalam satu bulan setiap hari minggu ke-2 dan ke-4 dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB yang berlokasi di Kampung Galumpit bukan di PKBM dan kegiatan pelatihan komputer secara langsung di PKBM Al-Fattah. Menurut NM, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kampung galumpit di mana rumah-rumah warga secara bergantian setiap pertemuan dijadikan kelas ataupun di mushola bahkan di Madrasah. Awalnya pembelajaran dilaksanakan satu bulan sekali setiap hari Jum'at siang pada pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB. Tetapi sekarang ada perubahan jadwal yang sudah disepakati kembali bersama warga belajarnya yaitu menjadi dua kali pertemuan dalam satu bulan setiap hari Minggu pagi dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB setiap minggu ke-2 dan Minggu ke-4 dikarenakan keterbatasan waktu tutor. Metode belajarnya pun beragam tidak hanya ceramah saja. Data warga belajar yang terbaru sekarang berjumlah 38 orang dari Paket B dan Paket C. Menurut AR, selaku perwakilan dari pihak PKBM Al-Fattah menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran sekolah paket di kampung galumpit dilaksanakan secara fleksibel dan tidak membebankan kepada warga belajar di sana karena menyesuaikan dengan karakteristik warga belajar yang rata-rata sudah berumah tangga. Jadi pada semester sekarang pembelajarannya dilaksanakan dua kali pertemuan dalam satu bulan setiap hari minggu pada minggu kedua dan keempat dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB.

Metode yang digunakan pada pembelajaran itu beragam ada diskusi, presentasi, ceramah, bahkan pernah dilakukan outing class dalam pembelajaran IPA sehingga pembelajaran cukup menyenangkan. Hal serupa dirasakan nyata oleh warga belajar, menurut SJ dan UW pembelajaran yang dilaksanakan pada sekolah paket di kampung galumpit sesuai dengan kondisi sosial warga belajar, metode pembelajaran yang disampaikan pun sesuai dengan karakteristik warga belajar karena setiap pembelajaran yang diterima pada setiap pertemuan itu mudah dipahami. Ketika ujian, warga belajar datang langsung ke PKBM Al-Fattah karena ujiannya menggunakan komputer. Berdasarkan hasil observasi peneliti sebagai bagian dari tutor relawan mengamati setiap kegiatan pembelajaran dilakukan terkadang di rumah warga di mushola bahkan di Madrasah dengan fasilitas belajar yang sederhana namun antusias warga belajar tetap cukup tinggi. Dokumentasi berupa foto kegiatan pembelajaran, foto pada saat pelaksanaan ujian, dokumem absensi warga belajar, absensi tutor, buku agenda, modul ajar, jadwa belajar, daftar warga belajar dan daftar tutor pun ada. Kemudian interaksi antara tutor dan warga belajar dalam setiap pembelajaran terekam dalam sebuah video sehingga dapat menjadi pendukung yang menunjukkan suasana belajar partisipatif dan kondusif dalam setiap pertemuan pembelajaran pendidikan kesetaraan di kampung Galumpit.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit, Setiawargi tidak hanya sekedar kegiatan pembelajaran saja, tetapi proses transformasi sosial yang membuktikan bahwa kelompok kerja sosial kolaboratif bekerja secara konkret dalam memecahkan masalah struktural pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran yang fleksibel, adaptif, dan diterima masyarakat tidak terjadi secara otomatis; keberhasilan ini merupakan hasil interaksi dari dinamika kelompok, kolaborasi lintas aktor, serta kemampuan Pager Asik dalam menjalankan peran kunci sebagai penggerak. Fleksibilitas dalam penentuan jadwal, lokasi, serta waktu pembelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003) bahwa pelaksanaan pendidikan kesetaraan dilaksanakan secara fleksibel tidak kaku seperti pendidikan formal. Selain itu, hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh (Herwina, 2021) bahwa pendidikan kesetaraan memiliki kedudukan sebagai pengganti pendidikan formal bagi masyarakat ang mengalami kesulitan mengakses pendidikan formal dengan sistem penyelenggaraannya fleksibel sesuai kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan pembelajaran yang berpindah-pindah dari rumah warga, mushola, hingga madrasah memperlihatkan bagaimana keterbatasan fasilitas tidak menjadi hambatan, karena kelompok mampu menggunakan sumber daya lokal secara kreatif. enggunaan ruang-ruang sosial warga sebagai kelas bukan hanya strategi teknis, melainkan

simbol penting bahwa pendidikan kesetaraan adalah program milik masyarakat, bukan program eksternal yang dipaksakan.

Metode pembelajaran yang menggunakan konsep andragogi tetap aplikatif dalam kehidupan sehari-hari dengan metode diskusi, ceramah, presentasi, dan *outing class* tidak hanya memberikan variasi metode saja, tetapi menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif yang memiliki pengalaman hidup yang relevan. Sesuai dengan konsep Andragogi yang dikemukakan oleh Knowless (1977) dalam Hiryanto (2017; hlm. 72) bahwa konsep andragogi bagi orang dewasa itu fleksibel, dari perspektif waktu dan orientasinya lebih kepada suatu pemahaman, penemuan masalah dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tahap intervensi ini tidak hanya untuk meningkatkan pengetahuan akademik saja tetapi juga menumbuhkan kepercayaan diri warga belajar bahwa mereka mampu belajar, memahami, dan berkembang. Adapun pelatihan keterampilan selaras dengan yang diungkapkan oleh Direktorat Pendidikan Kesetaraan (2010) dalam Mustofa et al. (2025) bahwa pendidikan kesetaraan tidak hanya memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menempuh pendidikan, melainkan memberikan pelatihan keterampilan yang akan berguna dalam meningkatkan kualitas hidup kedepannya.

Kolaborasi yang dijalankan pada tahap intervensi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Schmidt (2003) dalam Rezki Anriani et al., (2021; hlm.50) bahwa *in collaborative, planning and implementing are joint effort*. Pada *implementing* atau pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit diselenggarakan secara kolaboratif dengan berbagai pihak terlibat tanpa dilimpahkan kepada satu pihak. Pager Asik sebagai penggerak lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam setiap pembelajaran, PKBM Al-Fattah sebagai penjamin mutu dan legalitas serta fasilitator dalam memenuhi kebutuhan belajar warga di Kampung Galumpit, Kelurahan Setiawargi sebagai penjamin legitimasi sosial dan Karang Taruna sebagai penggerak lapangan dan logistik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada aktor yang mendominasi dan tidak ada aktor yang bekerja secara terisolasi. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Noel et al., 2022) konsep kolaborasi dalam kelompok kerja sosial menekankan pentingnya kerja sama antar berbagai pihak, komunikasi yang baik, dan pembagian tugas atau peran yang jelas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat pun dalam pelaksanaan program harus menjunjung tinggi kerja sama, pentingnya komunikasi dan pendampingan yang optimal supaya program dapat berkelanjutan (Hamdan et al., 2021). Komunitas Pager Asik sebagai agen perubahan yang menjadi sumber daya penggerak utama dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit memiliki beberapa keterampilan yang dikemukakan oleh Adi Saputra (2019; hlm.839):

- a) Kemampuan Menggerakkan masyarakat  
Pager Asik berhasil menggerakkan masyarakat khususnya yang berusia 25 tahun ke atas untuk kembali melanjutkan pendidikan melalui motivasi dan ajakan secara hormat dengan pendekatan personal.
- b) Kemampuan Negosiasi dan Mediasi  
Pager Asik berperan sebagai jembatan komunikasi antar pihak berbeda yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit. Contoh nyata ketika ketika musyawarah dengan warga belajar terkait penyesuaian jadwal pembelajaran dengan menjadi penengah supaya dari berbagai pihak tidak ada yang merasa keberatan.
- c) Memberikan Dukungan  
Pager Asik memberikan dukungan berupa pendampingan setiap pembelajaran pada pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit.
- d) Membangun Kesepakatan Bersama  
Setiap keputusan penting yang berkaitan dengan pembelajaran pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit, misalnya ada perubahan jadwal atau tempat belajar maka disepakati secara bersama bukan hanya satu pihak saja.
- e) Memfasilitasi Kelompok  
Pager Asik memastikan fasilitas kegiatan belajar mengajar setiap pertemuan dengan mengkondisikan tutor dan memastikan ruangan yang dipakai sebagai kelas sudah disiapkan papan tulisnya.

f) Memanfaatkan Sumber Daya dan Keterampilan

Pager Asik memastikan kegiatan pembelajaran memanfaatkan potensi lokal yang ada, contohnya rumah warga dijadikan kelas secara bergilir, tutor mengajar direkrut dari anggota Pager Asik untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar di kampung Galumpit.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Harlinda et al. (2020) bahwa pelaksanaan pendidikan kesetaraan di sebuah PKBM dilaksanakan secara terpusat dan birokratis dengan mendapatkan pengawasan dari Dinas Pendidikan. Pada penelitian ini, PKBM hanya mempertahankan fungsi *quality assurance* yang memastikan penerapan pembelajaran sesuai dengan standar pendidikan kesetaraan) dan melepas operasional di lapangan kepada Pager Asik. Ini menunjukkan bahwa kemandirian komunitas pemuda dalam menjalankan operasional pendidikan kesetaraan langsung di lapangan tidak mengurangi kualitas pendidikan yang berlaku sesuai standar karena adanya pembagian peran yang jelas dan dokumen-dokumen penunjang seperti absensi tutor, absensi warga belajar, serta buku agenda. Keberhasilan intervensi ini bukan hanya hasil dari proses belajar mengajar yang berjalan lancar, tetapi karena intervensi mampu mengatasi hambatan sistemik yang selama ini memperkuat ketidaksetaraan pendidikan: keterbatasan akses, jarak geografis, waktu belajar yang tidak fleksibel, beban domestik warga belajar, dan stigma bahwa sekolah paket kurang prestisius. Dengan memberikan sistem belajar yang fleksibel, menciptakan dukungan sosial melalui kelompok, serta menyediakan tutor relawan yang konsisten, intervensi ini justru menciptakan lingkungan belajar yang lebih adaptif dibandingkan pendidikan formal. Kelompok belajar tersebut berfungsi sebagai ruang aman bagi warga untuk berkembang tanpa tekanan struktural yang selama ini menghambat mereka. Tahap intervensi pada pelaksanaan pendidikan kesetaraan melalui program Lantera Bumi di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya dilaksanakan secara kolaboratif oleh kelompok kerja sosial tidak hanya menunjukkan keberhasilan teknis penyelenggaraan program, tetapi menjadi bukti bahwa pendekatan group work yang kolaboratif, kontekstual, dan berbasis pemberdayaan mampu mengatasi hambatan struktural pendidikan yang selama ini memarginalkan masyarakat di wilayah pinggiran. Model ini dapat direplikasi di wilayah serupa karena menunjukkan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh struktur birokrasi, tetapi juga oleh kualitas relasi sosial, dinamika kelompok, kepemimpinan komunitas, dan kemampuan memanfaatkan potensi lokal secara kreatif dan partisipatif.

### E. Tahap *Monitoring & Evaluasi*

Dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit terdapat kegiatan pemantauan yang dilakukan secara rutin dan monev yang dilaksanakan satu tahun sekali guna adanya perbaikan atau peningkatan dalam program yang sedang dijalankan. Menurut NM, pager asik melakukan pemantauan setiap pertemuan pembelajaran berlangsung. Jadi pada saat pembelajaran berlangsung, pager asik selalu mendampingi, melakukan pengecekan kehadiran warga belajar dan tutor memastikan tempat belajar yang digunakan sudah dipersiapkan dengan layak dan mengamati metode pembelajaran yang digunakan oleh tutor dalam mengajar. Selain itu dilakukan monev tahunan. Menurut AR dari PKBM Al-Fattah menyatakan bahwa PKBM Al-Fattah ikut terlibat dalam pemantauan perkembangan warga belajar secara rutin tetapi tidak secara langsung PKBM akan menerima laporan perkembangan warga belajar dari Pager Asik jika ada kendala saran ataupun kebutuhan belajar yang harus dipenuhi di kampung galumpit maka PKBM Al-Fattah dan pager asik akan berdiskusi dan mencari tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap masukan dari warga belajar. Adapun menurut AF sebagai ketua karang taruna menyatakan bahwa ketua karang taruna sering mendampingi dalam pelaksanaan pembelajaran untuk memantau warga belajar dalam hal kehadiran, partisipasi aktif warga belajar, tempat pelaksanaan dan menariksarana prasarana yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian karang taruna juga menyampaikan bahwa pemantauan terkait perkembangan pendidikan kesetaraan di galumpit itu dilaporkan kepada Kelurahan setiawargi. Hal serupa juga diungkapkan oleh SN selaku kepala Kelurahan setiawargi yang menyatakan bahwa pihak kelurahan tidak melakukan pemantauan secara langsung melainkan melalui penerimaan laporan dari karang taruna terkait perkembangan pendidikan kesetaraan di kampung galumpit.

Observasi peneliti sebagai tutor yang terlibat langsung di lapangan mengamati bahwa pager asik dan Karang taruna selalu mendampingi dan memantau setiap pembelajaran yang berlangsung di kampung galumpit. Komunikasi yang terjalin secara langsung di sana itu komunikasi yang terbuka dan fleksibel antar pihak. Kemudian peneliti juga mengamati komunikasi terkait laporan monitoring yang dilakukan oleh pager asik kepada PKBM Al-Fattah itu melalui grup WhatsApp yang berupa report kegiatan pembelajaran setiap pertemuan. Dokumentasi berupa foto kegiatan dan foto monev tahunan, dokumen daftar hadir warga belajar, daftar hadir tutor bukti report dari pager asik kepada PKBM Al-Fattah melalui grup WhatsApp menunjukkan bahwa monitoring dilaksanakan secara berkesinambungan. Tahap monitoring dan evaluasi pada penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit menunjukkan bagaimana mekanisme pengawasan program yang bersifat partisipatif dan kolaboratif mampu menjaga kualitas pelaksanaan serta menumbuhkan rasa kepemilikan bersama. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Zastrow (2004) dalam Muayyadah & Bengkel (2023) bahwa tahap monitoring merupakan tahap pemantauan yang dilakukan untuk melihat perkembangan program yang sedang dijalankan supaya tujuan program dapat tercapai sesuai rencana. Sedangkan tahap evaluasi merupakan tahap refleksi bersama dan penilaian terhadap keberhasilan program.

Monitoring yang dilakukan secara rutin oleh Pager Asik dan Karang Taruna selama proses pembelajaran berlangsung bukan hanya berfungsi sebagai pengawasan administratif melainkan juga sebagai bentuk pemantauan yang dilakukan dari jarak dekat sehingga masalah yang muncul dapat segera direspon. Kehadiran para relawan dalam setiap pertemuan menciptakan iklim belajar yang kondusif, membangun motivasi warga belajar, serta memperkuat hubungan sosial antarpihak, suatu kondisi yang selaras dengan prinsip dinamika kelompok dalam social group work yang menekankan pentingnya interaksi langsung dan dukungan sosial dalam menjaga kohesi kelompok. Monev tahunan berfungsi sebagai ruang refleksi bersama untuk menilai sejauh mana program mencapai tujuan serta apa saja perubahan yang dialami warga belajar. Evaluasi ini tidak hanya memotret aspek teknis seperti pelaksanaan jadwal atau ketercapaian modul, tetapi juga menilai perubahan sosial yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan di Kampung Galumpit telah memenuhi standar evaluasi pemberdayaan masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield (1985:173) dalam (Darodjat & M Wahyudhiana (2015) yang menegaskan bahwa pentingnya pemantauan pelaksanaan program secara berkelanjutan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan di lapangan. Evaluasi tersebut memberikan ruang terbuka bagi warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, mengemukakan pengalaman, dan berkontribusi dalam perbaikan program, sehingga memperkuat rasa memiliki dan komitmen jangka panjang.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jodis Simanullang et al. (2023) yang membuktikan bahwa penerapan tahapan monitoring dan evaluasi berperan penting pada social group work efektif dalam memantau perkembangan suatu kelompok. Keberhasilan monitoring dan evaluasi ini juga terkait erat dengan pola kolaborasi yang terbangun sejak tahap awal. Keterlibatan multi-aktor yaitu Pager Asik, PKBM Al-Fattah, Kelurahan Setiawargi, dan Karang Taruna menghasilkan sistem pemantauan berlapis yang saling melengkapi. Meskipun PKBM tidak selalu turun langsung, validasi data tetap terjaga melalui laporan dari Pager Asik dan Karang Taruna, sedangkan Kelurahan memperoleh gambaran perkembangan melalui laporan yang disampaikan secara berkala. Meskipun pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit belum menghasilkan lulusan, tahap monitoring dan evaluasi telah menunjukkan dampak awal program yang signifikan. Warga belajar dari kampung yang berbeda kini lebih saling mengenal dan memiliki solidaritas yang lebih kuat, kehadiran dan partisipasi meningkat, serta rasa percaya diri dalam mengikuti pembelajaran semakin terlihat. Hal ini menunjukkan bahwa monev tidak hanya berperan untuk memeriksa kualitas teknis program, tetapi juga berperan sebagai alat penguatan modal sosial, pemberdayaan psikologis, dan pembentukan budaya belajar baru di tingkat komunitas. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, keberhasilan semacam ini sangat penting karena membangun prasyarat sosial bagi keberlanjutan program jangka panjang. Pendekatan monitoring yang kolaboratif dan evaluasi yang reflektif menjadikan model ini relevan untuk direplikasi dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal lainnya, terutama di wilayah yang karakteristik sosialnya serupa.

## F. Tahap Terminasi

Tahap terminasi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan di kampung galumpit setiawargi kota Tasikmalaya melalui program lantera bumi merupakan proses pemberhentian dari pendampingan sosial yang dilakukan oleh komunitas pagar asik secara bertahap dan dilepas ketika masyarakat dirasa sudah mampu secara mandiri mengelola program secara berkelanjutan. Menurut NM, sampai saat ini RHK-Pager Asik masih berkomitmen untuk mendampingi pelaksanaan pendidikan kesetaraan di kampung galumpit sampai tuntas. Rencana terminasi memang sudah dipikirkan dan ada keinginan untuk melakukan terminasi dalam waktu dekat tetapi masih belum bisa dilakukan karena melihat masyarakat Belum cukup mandiri untuk mengelola pendidikan kesetaraan tersebut. Menurut AR selaku perwakilan dari PKBM Al-Fattah menyatakan bahwa jika pagar asik akan melakukan terminasi maka bentuk terlebih dahulu masyarakat yang mandiri dengan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kelompok pengelola yang sudah tetap dan paham mengenai mekanisme pengelolaan pendidikan kesetaraan. PKBM Al Fatah juga menilai bahwa pembentukan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola pendidikan kesetaraan di kampung galumpit harus dilakukan terlebih dahulu pengerahan maupun pelatihan, selain itu dukungan finansial dari pemerintah setempat yaitu Kelurahan setiawargi dianggap penting agar keberlanjutan program dapat terjamin. Menurut SN dan AF menuturkan bahwa Kelurahan setiawargi dan karang taruna akan menyetujui dan mendukung jika pager asik akan melakukan terminasi dalam waktu dekat, namun dengan catatan jika masyarakat sudah dirasa mandiri dan mampu mengelola pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit.

Berdasarkan observasi peneliti secara langsung, masyarakat di Kelurahan setiawargi khususnya di kampung galumpit mengalami kekurangan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelola pendidikan kesetaraan di kampung galumpit. Meskipun pada saat ini juga ada *local heroes*nya yaitu ketua karang taruna tetapi ketua karang taruna tidak akan bisa mengelola pendidikan kesetaraan seorang diri. Perlu adanya kelompok masyarakat tetap untuk mengelola pendidikan kesetaraan ini dengan adanya pemberian pengarahan dan pelatihan terlebih dahulu mengenai mekanisme pengelolaan pendidikan kesetaraan namun sampai saat ini kelompok masyarakat tersebut di Kelurahan setiawargi khususnya di kampung galumpit belum terbentuk. Tahap terminasi dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Kampung Galumpit menunjukkan bagaimana proses penghentian pendampingan tidak dapat dipahami hanya sebagai akhir hubungan kerja, tetapi sebagai indikator kesiapan masyarakat untuk mengambil alih program secara mandiri. Kondisi ini menggambarkan bahwa relasi yang terbentuk antara Pager Asik, PKBM Al-Fattah, Karang Taruna, dan masyarakat masih berada dalam fase transisi, di mana ketergantungan positif terhadap pendamping masih diperlukan untuk menjamin stabilitas program. Hal ini sejalan dengan tahap terminasi yang dikemukakan oleh Zastrow (2004) dalam Muayyadah & Bengkel (2023) bahwa tahap terminasi merupakan tahap akhir atau tahap pemberhentian hubungan kerjasama antara pekerja sosial dengan klien ketika klien sudah mampu secara mandiri mengelola program yang dijalankan supaya tidak terjadi ketergantungan kepada pekerja sosial.

Ketidaksiapan masyarakat dalam mengelola pendidikan kesetaraan berkaitan dengan beberapa faktor struktural. Pertama, jumlah individu yang memiliki pemahaman teknis mengenai mekanisme pengelolaan pendidikan kesetaraan masih sangat terbatas. Kedua, belum terbentuknya kelompok masyarakat tetap sehingga menyebabkan tidak adanya struktur organisasi lokal yang bisa menjadi pengganti peran Pager Asik. Ketiga, dukungan finansial dan kelembagaan dari pemerintah kelurahan masih belum terstruktur sehingga aspek keberlanjutan belum sepenuhnya terjamin. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Edi Suharto (2014) dalam Rahman et al. (2024) yang mengemukakan bahwa konsep pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui beberapa rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian atau kekuatan individu, kelompok maupun masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan supaya bisa mengontrol kehidupannya sendiri membuat keputusan sendiri serta mengelola sumber daya lokal untuk pelaksanaan program pemberdayaan secara berkelanjutan.

Keputusan Pager Asik untuk tidak menghentikan pendampingan secara tiba-tiba mencerminkan pemahaman yang baik terhadap risiko premature termination. Jika terminasi dilakukan terlalu cepat, program berpotensi mengalami stagnasi atau kegagalan karena masyarakat belum memiliki landasan struktural dan teknis yang memadai. Oleh karena itu, Pager Asik strategi merencanakan terminasi bertahap melalui pelatihan, penguatan kapasitas, dan pembentukan kelompok pengelola. Menariknya, di kampung galumpit peran ini dijalankan oleh komunitas Pager Asik yang tidak hanya sebagai fasilitator saja tetapi juga berperan dalam membangun kapasitas masyarakat atau sumber daya manusia di kampung galumpit untuk memiliki kemampuan atau kemandirian dalam mengelola pendidikan kesetaraan. Temuan ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyadi et al. (2025) yang mengemukakan bahwa peran Pekerja Sosial tidak hanya sebagai pendamping atau fasilitas saja tetapi harus memastikan keberlanjutan program sosial setelah pendampingan berakhir supaya masyarakat bisa mandiri dan berdaya untuk melanjutkan program tersebut.

Proses terminasi yang bertahap dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan di kampung galumpit dapat menjadi model untuk program serupa di mana pendamping atau pekerja sosial atau fasilitator tidak melakukan pemberhentian secara langsung tetapi dilakukan secara bertahap dalam pengalihan tanggung jawab pengelolaan pendidikan kesetaraan kepada masyarakat sehingga dalam proses yang bertahap tersebut sebagai fasilitator dapat memberikan pendampingan peng arahan maupun pelatihan terlebih dahulu kepada kelompok masyarakat yang nantinya akan mengelola pendidikan kesetaraan tersebut. Tahap terminasi dalam pelaksanaan pendidikan kesetaraan di kampung galumpit menunjukkan bahwa tahap terminasi bukanlah akhir dari sebuah program yang sedang dijalankan tetapi merupakan awal dari kemandirian masyarakat. Proses terminasi yang dilakukan secara bertahap benar-benar memastikan masyarakat sudah mampu secara mandiri mengelola pendidikan kesetaraan yang menggambarkan keberhasilan proses pemberdayaan di mana masyarakat yang semula hanya sebagai penerima manfaat, kemudian beralih menjadi penggerak utama dalam menjalankan pendidikan kesetaraan di kampung galumpit secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan pendidikan kesetaraan melalui program lantera bumi di Kampung Galumpit Setiawargi melibatkan beberapa pihak yang membentuk kelompok kerja sosial secara kolaboratif. Komunitas Pemuda Penggerak Tasikmalaya (Pager Asik) menjadi penggerak utama yang menjalin kerja sama dengan PKBM AL-Fattah, Kelurahan Setiawargi, dan Karang Taruna Steiawargi . Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kelompok kerja sosial kolaboratif dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui program lantera bumi di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya, maka disajikan bagan hasil penelitian berikut:

## Kesimpulan

Kelompok kerja sosial kolaboratif dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melalui program Lantera Bumi oleh Pemuda Penggerak Tasikmalaya di Kampung Galumpit, Setiawargi, Kota Tasikmalaya yang bekerja sama dengan PKBM Al-Fattah, Kelurahan Setiawargi dan Karang Taruna. Kolaborasi ini berjalan dengan prinsip dasar kepercayaan, komunikasi terbuka, partisipasi, dan berbasis kebutuhan lokal. Dalam praktiknya, terdapat beberapa tahap kelompok kerja sosial yang diterapkan yaitu pertama, tahap engagement, intract dan contract sebagai tahap awal pembentukan hubungan, penyamaan persepsi sampai dengan adanya kontrak kerja sama berupa MoU antara PKBM Al-Fattah dengan Kelurahan Setiawargi. Kedua, tahap Assesment yang dilakukan untuk menggali kebutuhan masyarakat melalui transect walk, dan rembug warga berbasis Methodology Participatory for Assesment (MPA). Ketiga, tahap planning dengan penyusunan rencana pembelajaran meliputi penentuan jadwal, tempat, metode pembelajaran dan perekrutan tutor. Keempat, tahap intervensi yang diwujudkan melalui kegiatan belajar mengajar dan pelatihan keterampilan komputer. Kelima, monitoring dan evaluasi dengan melakukan pemantauan rutin setiap pertemuan pembelajaran dan monev tahunan melalui pengisian formulir, wawancara dan analisis dokumen pembelajaran. Keenam, tahap terminasi yang belum dilaksanakan oleh Pager Asik karena dirasa masyarakat masih belum bisa mandiri dalam mengelola pendidikan kesetaraan. Secara keseluruhan, kelompok kerja sosial kolaboratif yang diinisiasi oleh komunitas pemuda mampu menyelenggarakan pendidikan kesetaraan di



Kampung Galumpit dapat terlaksana secara partisipatif, adaptif, dan kolaboratif. Secara substantif, meskipun program belum menghasilkan lulusan resmi pendidikan kesetaraan karena program masih berlangsung, dampak positif mulai terlihat. Terdapat peningkatan jumlah warga belajar yang aktif saat ini tercatat 38 peserta dari Paket B dan C, peningkatan motivasi untuk melanjutkan pendidikan, peningkatan keterampilan dasar melalui pelatihan komputer, serta terbentuknya solidaritas sosial antar kampung dalam satu kelurahan. Warga belajar menunjukkan perkembangan positif berupa meningkatnya kepercayaan diri, keterbukaan terhadap pendidikan, dan kemampuan memahami materi pembelajaran.

Dengan demikian, keberhasilan tidak hanya tampak pada proses kolaborasi, tetapi juga pada transformasi sosial dan kognitif warga belajar. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu dampak jangka panjang belum dapat dievaluasi secara menyeluruh karena belum terdapat lulusan pendidikan kesetaraan pada periode penelitian. Keterbatasan dokumentasi awal menyebabkan analisis keberlanjutan program menjadi bergantung pada data kualitatif dan pengamatan lapangan. Kemudian belum adanya kelompok pengelola lokal yang permanen menyulitkan evaluasi mengenai kesiapan masyarakat dalam melanjutkan program tanpa pendampingan. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa model kelompok kerja sosial kolaboratif yang diterapkan Pager Asik dapat menjadi alternatif strategis dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan formal. Pendekatan partisipatif dan fleksibel terbukti mampu meningkatkan keterlibatan dan kesadaran pendidikan pada masyarakat dewasa. Secara praktis, temuan ini mendorong pentingnya pelatihan intensif bagi kelompok masyarakat lokal untuk mencapai kemandirian dalam jangka panjang. Secara akademik, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa konsep social group work dapat diadaptasi secara efektif oleh komunitas nonprofesional dan tetap menghasilkan dampak sosial yang signifikan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi implementasi program pendidikan berbasis komunitas di wilayah 3T dan daerah dengan hambatan geografis serta sosial ekonomi yang serupa.

## Daftar Pustaka

- Adi Saputra, A. (2019). Peran Pemuda sebagai Agent Of Change dalam Pemberdayaan Masyarakat pada Usaha Pariwisata Kuliner di Kampung Nelayan Ampang Pulau Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 1(4), 835–842.
- Anriani, S. R., Hasanuddin, & A Shyam Paswah Alam. (2021). Strategi Kolaboratif dalam Manajemen Pelayanan Bimbingan Dan Konseling di Sekolah. *JUBIKOPS: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Psikologi*, 1(1), 48–62.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. (2024). *Metode Baru Rata-rata Lama Sekolah pada Tahun 2024*. BPS RI. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE1IzI=/metode-baru-rata-rata-lama-sekolah.html>
- Darodjat, & M, W. (2015). Model Evaluasi Program Pendidikan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(1), 1–23.
- Fairuza, M. (2019). *Kolaborasi antar Stakeholder dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata ( Studi Kasus Wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi )*. 1–13.
- Freire, Paulo., Ramos, M. Bergman., Macedo, D. P. ., & Shor, Ira. (2018). *Pedagogy of the oppressed*. The Continuum International Publishing Group Inc.
- Hamdan, A., Tanu Jaya, M. A. R., & Karwati, L. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BumDesa) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Community Empowerment Through The Village Owned Business Entity Program (Bumdesa) In Improving The Family Economy. *Jurnal Obor Penmas*, 5(1), 22–32. <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipd>
- Harlinda, M., Madani, M., & Tahir, M. (2020). Manajemen Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Amanah Ummat Makassar. *KIMAP (Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik)*, 1(1), 43–58. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3717>
- Haryoko, S., Bahatiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Makassar.

- Herwina, W. (2021). Peningkatan Minat Membaca Warga Belajar Melalui Kampung Literasi Di Pkbm Al-Hidayah Tasikmalaya. *Jendela PLS*, 5(2), 112–121. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2712>
- Hiryanto. (2017). Pedagogi, Andragogi Dan Heutagogi Serta Implikasinya Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Dinamika Pendidikan*, 22(1), 65–71.
- Istyawan, A. (2025). *Aplikasi Methodology for Participatory Assessment dalam Asset-Based Community Development di Desa Mekarjaya Kabupaten Sumedang*. 5(4), 2773–2782.
- Muayyadah, S., & Bengkel, B. (2023). Meningkatkan Percaya Diri Anak Panti Asuhan dalam Penggunaan Bahasa Inggris dengan Metode Groupwork. *ABDISOSHUM: Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 30–36. <https://doi.org/10.55123/abdisoshum.v2i1.1412>
- Mustofa, Z., Hidayati, N., & Basri, H. (2025). Memahami dinamika pendidikan kesetaraan dalam pemberdayaan masyarakat desa: PKBM Rumah Pintar Karangharjo Silo Jember. *Srodja*, 2(1), 161–179.
- Napsiyah, S., Fazrha Bunga Arcadia, R., Fadillah Syafa'at, D., Putri Puspita, F., Naufal Ardiansyah, M., & Rifa Amalia, R. (2023). Peran Mahasiswa Sebagai Agent Of Change Dalam Mengembangkan Potensi Pemuda Di Kampung Krajan Desa Simpang. *Jurnal Kesejahteraan Dan Pelayanan Sosial*, 4(2), 182–196. <https://doi.org/10.52423/jkps.v4i2.18>
- Noel, L., Chen, Q., Petruzzi, L. J., Phillips, F., Garay, R., Valdez, C., Aranda, M. P., & Jones, B. (2022). Interprofessional collaboration between social workers and community health workers to address health and mental health in the United States: A systematised review. *Health and Social Care in the Community*, 30(6), e6240–e6254. <https://doi.org/10.1111/hsc.14061>
- Oktiwanti, L. (2016). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Keberdayaan Anggota Gabungan Kelompok Tani Pada Sekolah Lapang. *Jurnal Ilmiah VISI PPTK PAUDNI*, 11(1).
- Prasetyo Adi Franciscus & Wulandari Kusuma. (2023). *Buku Ajar Metode Intervensi Pekerjaan Sosial dengan Kelompok*. Zifatama Jawaara.
- Prasetyo, D. (2020). Memahami Masyarakat Dan Perspektifnya. *JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 2716–3768. <https://doi.org/10.38035/JMPIS>
- Putri, A. (2023). *Pengaruh aspek social group wok dalam P2K2 terhadap Perilaku Sosial KPM PKH di Kelurahan Duren Mekar Bojongsari Depok (SKripsi)*. Universitas Islam Negeri SYarif Hidayatullah Jakarta.
- Rahman, E. Y., Ferizaldi, Hermawati, I., Wijayanti, L. A., & Mahmudin, T. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Saleh, S. (2023). *Mengenai Penelitian Kualitatif*. AGMA (Anggota IKAPI).
- Syamsuddin. (2020). *Dasar-Dasar Pekerjaan Sosial dengan Kelompok (Group Work)*. Alauddin University Press.
- Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2009 Kepemudaan. (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38784/uu-no-40-tahun-2009>
- Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/details/43920/uu-no-20-tahun-2003>
- Wibowo, H. (2017). Praktik Bekerja Bersama Kelompok Untuk Penguatan Program Pelatihan Dan Pengembangan. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 102–108. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13823>
- Yusuf, D., & Razi, F. (2025). Analisis Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Rendahnya Capaian Pendidikan di Indonesia Menggunakan Kominasi Metode Data Mining. *JuSIN: Jurnal Sistem Informasi*, 6(1), 51–62.